



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
DAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015

Capaian Kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jemberana Tahun 2015 terkait dengan capaian kinerja akhir masa pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016, sehingga evaluasi hasil yang didapatkan adalah hasil pelaksanaan RKPD dari tahun 2011 s/d 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adapun aspek yang dievaluasi meliputi :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus senibudaya dan olahraga yang diuraikan sebagai berikut :

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jemberana

Struktur perekonomian Kabupaten Jemberana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 17 lapangan usaha yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan . Dalam kurun waktu periode tahun 2011-2015 struktur perekonomian Kabupaten Jemberana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut :

Tabel 2.1
PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku
Kabupaten Jemberana Tahun 2011– 2015

Dalam Juta Rp/ In Million of Rp

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015***
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, & Fishing</i>	1.416.013,56	1.524.157,38	1.648.866,2	1.850.134,2	
B. Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	63.362,61	74.071,9	82.867,5	91.863,4	
C. Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	311.124,04	341.071,1	380.969,9	442.429,5	
D. Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity & Gas</i>	7.035,33	6.798,7	6.540,5	8.497,2	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	6.986,86	7.053,1	7.421,4	8.188,4	
F. Konstruksi <i>Construction</i>	588.338,92	736.072,1	804.388,3	862.256,3	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicle</i>	655.215,85	698.796,8	796.395,8	889.811,5	



<i>ehicles&Motorcycles</i>					
H.Transportasi danPergudangan <i>Transportation&Storage</i>	937.357,59	1.063.822,5	1.241.712,6	1.538.797,8	
I.PenyediaanAkomodasi danMakanMinum <i>Accommodation&FoodServiceActivitie s</i>	813.462,50	920.075,4	1.074.369,8	1.327.112,0	
J.Informasi danKomunikasi <i>Information&Communication</i>	393.047,53	418.169,6	434.260,1	480.746,0	
K.JasaKeuangandanAsuransi <i>Financial&InsuranceActivities</i>	182.969,19	214.001,4	249.709,3	288.916,2	
L.Real Estate <i>Real EstateActivities</i>	348.353,05	371.324,5	409.692,4	470.073,3	
M,NJasaPerusahaan <i>BusinessActivities</i>	47.122,43	49.971,3	55.333,6	63.641,3	
S.O.Administrasi U Pemerintah,an,Pertahanan,danJaminan <i>PublicAdministration&Defence;CompulsorySocial b Security</i>	202.750,10	203.087,5	202.577,7	232.312,2	
P.JasaPendidikan <i>Education</i>	120.289,84	125.427,4	150.923,0	175.146,5	
Q.JasaKesehatandanKegiatanSosial <i>HumanHealth&Social WorkActivities</i>	115.963,24	126.138,2	146.541,1	169.890,2	
R,S,T,U.JasaLainnya <i>OtherServicesActivities</i>	86.139,93	92.910,7	104.284,8	119.900,8	
ProdukDomestikRegionalBruto(PDR B)GrossRegional DomesticProducts(GDRP)	6.295.532,55	6.972.949,70	7.769.853,83	9.019.716,82	

Kabupaten Jemberana.

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian,transportasi dan Pergudangan masih dominan menyusul, bidang Penyediaan Akomodasi dan makan minum,perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, kontruksi, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jemberana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan dalam arti luas.

Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jemberana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2011– 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp)
2011	1.836.899,81	3.936.308,26
2012	6.365.857,71	6.972.949,70
2013	6.727.786,41	7.769.853,83
2014	7.134.660,29	9.019.716,82
2015		

Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumah tangga semakin tinggi prosentase inflasi akan berdampak pada redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat inflasi jugadapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi, kesempatan kerja



dan memperlemah daya saing ekspor di pasar internasional jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak kepada instabilitas lingkungan. Pada tahun 2011 laju inflasi Kabupaten Jemberana sebesar 3,75 %, pada tahun 2012 sebesar 4,71 % kemudian tahun 2013 sebesar 7,35% Pada tahun 2014 mencapai 8,43% dan tahun 2015 mencapai 1,68%.

3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jemberana Tahun 2010 - 2014

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jemberana tahun 2011-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2010 PDRB per Kapita Kabupaten Jemberana mencapai Rp. 21.574.943,34 meningkat menjadi Rp 33.431.122,40 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,74 persen.

4) Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jemberana untuk kurun waktu 2011 – 2014 pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Gini Ratio Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Gini Ratio
1	2011	0.4020
2	2012	0.3706
3	2013	0.3710
4	2014	0.3863
5	2015	

Sumber data : BPS Provinsi Bali

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2011 – 2014 Kabupaten Jemberana Gini Rasionya terkatagorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jemberana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (15 sektor). Pada tahun 2014 ketimpangan Gini Ratio meningkat sehingga perlu diupayakan rendah kembali.

5) Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber data, yaitu data yang dikeluarkan BPS setiap tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data BPS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data



yang dikeluarkan BPMPD Kabupaten Jemberana merupakan data sensus yang dilakukan setiap tahun. Adapun indikator yang digunakan adalah 14 indikator local yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Jemberana berdasarkan indikator-indikator yang dimiliki berbagai kementerian/lembaga ditambah 3 indikator intervensi.

Seiring dengan peningkatan ekonomi, berdasarkan data BPMPD jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 7,0% menurun menjadi 6,1 % pada tahun 2012, menurun lagi pada tahun 2013 menjadi 5,3% tahun 2014 sebesar 4,60% dan tahun 2015 menjadi 4,3%. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin $P = 100\% - \% \text{ KK miskin}$. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 93 % meningkat menjadi 93,9 % pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 94,7% pada tahun 2013, 95,40% pada tahun 2014 dan di tahun 2015 meningkat menjadi 95,7%.

b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek huruf Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.4
Angka Melek huruf Kabupaten Jemberana Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Melek Huruf(AMH)
(1)	(2)
2011	90,69
2012	91,36
2013	92,65
2014	96,12
2015	90,30

Sumber data : BPS Provinsi Bali

2. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.5
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jemberana Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
2011	7,80
2012	7,80
2013	7,87
2014	7,87
2015	7,3

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jemberana tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

Tahun	AngkaPartisipasiKasar(APK)		
	SekolahDasar (SD)	SekolahMenengahPertama (SMP)	SekolahMenengahAtas (SMA)
2011	113,94	116,98	98,07
2012	113,95	117,01	98,21
2013	108,75	119,85	98,71
2014	106,46	128,83	114,75
2015	107,65	133,26	115,00

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

4. Angka Pratisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jemberana tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

Tahun	AngkaPartisipasiMurni(APM)		
	SekolahDasar (SD)	SekolahMenengahPertama (SMP)	SekolahMenengahAtas (SMA)
2011	98,43	93,85	74,96
2012	98,71	93,97	86,03
2013	96,28	99,12	89,10
2014	93,09	98,74	82,87
2015	94,78	100	80,19

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

5. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.8
Angka Kematian Balita Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 – 2015

Tahun (1)	AngkaKematian Balita (AKABA) (2)
2011	14,52
2012	11,47
2013	6,70
2014	8,77
2015	7,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.9
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Kematian Bayi (AKB)
(1)	(2)
2011	9,16
2012	10,63
2013	6,93
2014	7,5
2015	5,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

7. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Kematian Ibu/100.000 KH
(1)	(2)
2011	93,60
2012	125,10
2013	69,09
2014	42,8
2015	145,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

8. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.11
Usia Harapan Hidup Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Usia Harapan Hidup
(1)	(2)
2011	71,8
2012	71,8
2013	71,8
2014	71,8
2015	71,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator. Jumlah grup kesenian dan jumlah gedung Kesenian.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah Group Kesenian	491	491	495	556	556
2	Gedung Kesenian.	2	2	4	4	4

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



B. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari:

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Capaian kinerja atas layanan urusan wajib meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Berikut disajikan capaian kinerja dari masing-masing urusan wajib:

1) Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	98,50	98,53	98,94	93,09	106,57
2	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	1:135	1:135	1:135	1:135	1:133
3	Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs	1:364	1:341	1:320	1:317	1:308
4	Rasio ketersediaan sekolah SMA	1:669	1:662	1:628	1:585	1:352
5	Rasio guru: murid.SD/MI	1/19	1/19	1/19	1/19	1:17
6	Rasio guru: murid.SMA/MA	1/21,7	1/13	1/13	1/13	1:13
7	Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI	1/1,3	1/1,2	1/9	1/9	1:9
8	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs	1/1,3	1/2	1/1,4	1/1,4	1:14
9	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA	1/1,3	1/2	1/1,3	1/2,8	1:3

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



2) Urusan kesehatan

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Gizi Buruk, Umur Harapan Hidup, Ratio Posyandu per-100 balita, Ratio puskesmas, Poliklinik, postu per-10.000 penduduk, Ratio Rumah Sakit Per-100.000 Penduduk, Ratio Dokter per-100.000 penduduk, Ratio Bidan per-100.000 Penduduk, Ratio Perawat Per-100.000 penduduk.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka Kematian Ibu	93,60	125,10	69,09	42,8	145,7
2	Angka Kematian Bayi	9,16	10,63	6,93	7,5	5,8
3	Angka Kematian Balita	14,52	11,47	6,70	8,77	7,5
4	Gizi Buruk	0,01	0,44	0,41	0,05	0,03
5	Usia Harapan Hidup	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
6	Rasio Posyandu per Satuan 100 Balita	-	2,63	2,59	1,59	2
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	4,55	4,55	4,55	2	2
8	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	1,30	1,30	1,30	1,11	1,11
9	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	25,21	27,66	33,16	34,84	27,98
10	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	40,52	71,34	111,70	174,39	12,43
11	Rasio perawat per 100.000 Penduduk	-	-	-	71,53	2,21
12	Cakupan pertolongan persalihan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan	103,14	99,40	94,95	80,4	91,04
13	Cakupan desa kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100 %
15	Angka Kesakitan	18,10	14,36	13,10	29,8	56,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jemberana Th 2015

3) Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m.



Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	82,98	84,14	89,14	94,14	96
2	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	66	72	80,80	89,60	64,14
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	85,67	92,39	92,39	76	91,73

Sumber: Dinas PU Kab. Jemberana Th 2012

4) Urusan Perumahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	94,51	96,61	91,54	91	57,77
2.	Rumah tangga pengguna listrik	72	-	-	-	-
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	93,29	94,69	92,69	76	68,76
4.	Rumah layak huni (%)	91,99	92,39	92,39	83,01	93,11

Sumber: Dinas PU Kab. Jemberana Th 2015

5) Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	25	25	25	44	44
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	25,8	22,9	26,34	30	4,41

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jemberana Th 2015
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jemberana Th 2015

6) Urusan Perencanaan Pembangunan,

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.



Tabel 2.18

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1	1	1	1	1
3.	Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS	5	5	5	5	5
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jemberana Th 2015

7) Urusan Perhubungan,

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat.

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Arus penumpang angkutan umum (%)	48,58%	49,16%	53,01%	49,17%	64,59%
2.	rasio Ijin trayek(%)	33,47%	22,04%	6,53%	24,08%	18,78%
3.	Jumlah uji kir angkutan umum (kali)	2428	3050	3280	3562	3712
4.	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Th 2015

8) Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Pencemaran status mutu air, Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan.

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase penanganan sampah	77,22	77,35	77,50	77,58	77,78
2	Pengelolaan kualitas air (kali penetapan kelas air)	1	2	2	2	8
3	Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan (%).	100	100	100	100	100
4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	32	32	36	36	28
5	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertanian Kab. Jemberana Th 2015



9) Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	47,09%	47,09%	62,05%	64,92%	64,93%
2	Penyelesaian kasus tanah negara(%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyelesaian izin lokasi(%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jemberana Th 2015

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase Kepemilikan KTP dan Kepemilikan Akta kelahiran.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% kepemilikan KTP	81,08	82,70	83,45	84,56	89,68
2	% kepemilikan akta kelahiran	-	-	9,54	30,61	32,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jemberana Th 2015

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,25	3,24	3,25	3,57	3,57
2	Rasio KDRT (kali dalam setahun)	14	49	46	9	21
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	0,03	-	-	-	-
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jemberana Th 2015

12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I.



Tabel 224

Capaian Kinerja Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rata – rata jumlah anak per keluarga	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	Rasio akseptor KB (%)	88,74	88,81	88,25	85,45	88,45
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	88,74	88,81	88,25	85,45	88,45
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)	7,77	8,49	8,54	13,22	13,22

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jember Th 2015.

13) Urusan Sosial

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	19	16	17	17	18
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	17,79
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	17,79

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Th 2015

14) Urusan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka partisipasi angkatan kerja(%)	77,62	78,34	70,26	72,49	70,90
2	Angka Angkatan Kerja (Orang)	152.237	155,121	140,474	146,400	144.733
3	Angka Kesempatan Kerja(%)	150.042	154.979	137.223	142.086	142.434
4	Pengangguran (orang)	5.368	3.055	4.863	4.314	2.299
5	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali)	15	10	8	0	0
6	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	31,2	35,6	38	40	49
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,53	1,97	3,46	2,95	1,59
8	Keselamatan dan perlindungan (%)	82	84	80	80	82
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah(%)	1	0	0,5	0,5	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Th 2015



15) Urusan Koperasi dan UKM

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase koperasi aktif (%)	92,79	91,77	92,15	92,30	92.89
2	Usaha mikro dan kecil (%)	109	102	38	103	105

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jemberana Th 2015

16) Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Lama proses perizinan (hari)	10h	10h	10h	10h	10h
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	12	12	12	12	-

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jemberana Th 2015

17) Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali)	8	8	22	24	24
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (kali)	6	6	6	6	6
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	47%	47%	50%	60%	60%

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Th 2015

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga.



Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah Klub Olah raga	5	5	5	5	5
2.	Jumlah Gedung Olah Raga	7	7	7	7	7
3.	Jumlah Organisasi Pemuda	25	22	22	22	22
4.	Jumlah Organisasi Olah raga	13	26	26	26	26
5.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	8
6.	Jumlah Kegiatan Olah raga	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Th 2015

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	70	70	70	70	70
2	Persentase Ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	70	70	70	70	70

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember Th 2015

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio jumlah polisi pamong praja	97	97	97	98	98
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	62	62	62	62	175
3	Frekwensi penanganan unjuk rasa	1	1	-	-	-



4	Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	50	49	96	96	96
5	Kemiskinan (KK)	5.935	5.308	4.683	4.049	3.737
6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	1	1	1	1	1
7	Penegakan Perda	120	120	106	435	457
8	Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD	-	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda
9	Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan	-	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah
10	Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM(Kasus)	-	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
11	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
12	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
13	Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Sumber: Pemerintah Kab. Jemberana Th 2015

21) Urusan Ketahanan Pangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Regulasi ketahanan pangan (buah)	4	4	4	4	4
2	Ketersediaan pangan utama (kg)	132.927,48	168.770,00	128.991,73	157.930,60	128.783,04

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jemberana Th 2015

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	10	10	10
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	51	51	51	51	51

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jemberana Th 2015



23) Urusan Statistik

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”.

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Buku “Kabupaten dalam angka” (buah)	1	1	1	1	1
2	Buku “PDRB Kabupaten” (buah)	1	1	1	1	1

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jemberana Th 2015

24) Urusan Kearsipan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan jumlah pengelola kearsipan.

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	60	100	100	100	100
2	Jumlah pengelola kearsipan	2	2	2	2	2

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jemberana Th 2015

25) Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/Expo.

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Jumlah jaringan komunikasi (buah)	4	6	9	9	9
2	Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk	0,01	0,16	0,18	0,20	0,20
3	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	15	15	16	16	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)	8	5	5	5	5
5	Webside milik pemerintah daerah (buah)	1	1	1	1	1
6	Pameran/Expo (kali)	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Komunkas dan Informatika Kab. Jemberana Th 2015

26) Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas.



Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	jumlah tenaga perpustakaan	10	8	10	6	6
2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	100	100	100	100	100
3	Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas	51	51	51	51	51

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jemberana Th 2015

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan.

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jemberana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

1) Urusan Pertanian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Kontribusi lapangan usaha Peternakan terhadap PDRB (%)	19,02	19,65	20,76	20,88	21,50
2	Produktivitas Padi ton/Ha	5,833	6,558	6,095	6,845	6,674
3	Produktivitas Sayuran Kw/Ha)	44	44	11,10	53,37	53.37
4	Produktifitas Kelapa dalam Kg/Ha	1.160	1.170	1.150	1.180	1.010
5	Produktifitas Kopi Robusta Kg/Ha	270	290	260	280	290
6	Produktifitas Cengkeh Kg/Ha	20	390	240	240	230
7	Produktifitas Kakao Kg/Ha	430	430	630	670	640
8	Produktifitas Panili Kg/Ha	280	300	40	20	0.5

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan tahun 2015

*Hasil dari Perhitungan

2) Urusan Kehutanan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan.



Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)	44,53%	47,85%	63,88%	68,18%	71,82%
2	Kerusakan kawasan hutan(%)	26,63%	26,63%	26,15%	25,42%	24,94%
3	Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perikanan, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jemberana tahun 2015

3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Pertambangan tanpa izin/Liar	-	-	-	-	-
2	% Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	1,01%	1,09	1,10	1,02	0

Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

4) Urusan Pariwisata

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Kunjungan wisata (Orang/Tahun)	89.474	98.859	134.093	132.170	156.247
2	Kontribusi lapangan usahapariwisata terhadap PDRB (%)	0,012	0,012	-	-	-

Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

5) Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Jumlah produksi ikan	54.24%	55.65%	31.17%	49.44%	42.07%
2	% Capaian target	84.78	96.28	90.08	92.10	92.89



3	Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun)	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35.00%
---	-------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas Perikanan Kehutanan dan Kleautan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

6) Urusan Perdagangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Perdagangan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB	0,11	0,10	0,10	0,09	-
2	Ekspor Bersih Perdagangan	144.229.332.100	1.018.974.000,46	217.166.690,075	1.422.888.965,094	361.128.670.065

Sumber: Analisa data BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

7) Urusan Perindustrian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, dan Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB	4,92%	4,90%	4,99%	5,04	-
2	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	3,30%	1,03%	0,45%	(73,02)%	2,04%

Sumber: BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

8) Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB.



Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Transmigrasi swakarsa(KK)	0	0	24	0	10
2	Kontribusi Sektor Ekonomi/lapangan usaha transmigrasi terhadap PDRB (%)	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2.2. Evaluasi Target dan Realisasi Keuangan RKPD Tahun 2015.

Kabupaten Jemberana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow priority program*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jemberana lima tahun kedepan dengan melihat kinerja keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

A. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber, yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah sebagai upaya penggerak roda pembangunan. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Adapun rincian capaian kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2015 sesuai dengan sumber – sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015 dipasang target sebesar Rp. 80.009.173.733,84,- dengan realisasi / capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 98.159.961.436,55,- atau 122,69 % sehingga mengalami pelampauan sebesar Rp. 18.150.787.702,71,- atau 22, 69 %. Adapun target dan realisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :



- Pelampauan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor BPHTB, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran.
- Retribusi belum mencapai target yang ditetapkan utamanya bersumber dari retribusi umum dan jasa usaha belum maksimal.
- Pelampauan penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan adalah sumber pendapatan asli daerah yang diterima PT Bank BPD Bali.
- Pelampauan penerimaan dari Lain – lain Pendapatan asli daerah (PAD) yang sah karena pelampauan signifikan dari pendapatan Badan Layanan Umum baik RSU Negara maupun dari Puskesmas.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan daerah ditinjau dari dana perimbangan pada tahun 2015 dipasang target sebesar Rp. 583.400.619.000,- dengan capaian kinerja keuangan/ realisasi sebesar Rp. 577.461.799.183,- atau 98,98 %, sehingga belum mencapai target sebesar Rp. 5.938.819.817,- atau 1,02 %. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan dana dari dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dari target yang ditentukan sebesar Rp. 21.627.129.000,- capaian kinerja keuangan/realisasi sebesar Rp. 15.688.309.183,- atau 72, 54 % sehingga belum mencapai target Rp. 5.938.819.817,- atau 27,46 %. Sedangkan untuk sumber pendapatan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mencapai target 100 %.

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan daerah lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan dana alokasi desa. Dari target tahun 2015 sebesar Rp. 233.548.466.659,52,- realisasi sebesar Rp. 228.127.824.369,38 atau 97,68 % belum mencapai target Rp. 5.420.642.290,14 atau 2,32 %. Karena dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi utamanya bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi sudah mencapai target 100 %. Sedangkan Dana Alokasi Desa adalah dana transfer pusat mencapai target yang ditentukan 100 %.

Ringkasan Pendapatan daerah untuk Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.47
Ringkasan Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2015

No	Uraian	Target	Realisasi		Peningkatan/Penurunan Realisasi	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	896.958.259.393,36	903.749.584.988,93	100,76	6.791.325.595,57	0,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.009.173.733,84	98.159.961.436,55	122,69	18.150.787.702,71	0,23
4.1.1.	Pajak Daerah	28.146.000.000,00	32.367.397.468,97	115,00	4.193.010.968,97	0,15
4.1.2	Retribusi Daerah	9.659.356.681,00	8.930.165.048,00	92,45	(729.191.633,00)	(0,08)



Pemerintah Kabupaten Jemberana

4.1.2.01	Retribusi jasa Umum	5.784.110.681,00	5.196.700.831,00	89,84	(470.632.055,00)	(0,08)
4.1.2.02	Retribusi Jasa usaha	2.981.186.000,00	2.497.771.732,00	83,78	(483.414.268,00)	(0,16)
4.2.2.03	Retribusi perizinan tertentu	894.060.000,00	1.235.692.485,00	138,21	53.538.750,00	0,06
4.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.911.035.292,84	4.912.891.848,84	100,04	1.856.556,00	0,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	37.292.781.760,00	51.949.507.070,74	139,30	14.656.725.310,74	0,39
4.2	DANA PERIMBANGAN	583.400.619.000,00	577.461.799.183,00	98,98	(6.150.648.784,00)	(0,01)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21.627.129.000,00	15.688.309.183,00	72,54	(6.150.648.784,00)	(0,28)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	486.895.030.000,00	486.895.030.000,00	100,00	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	74.878.460.000,00	74.878.460.000,00	100,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.548.466.659,52	228.127.824.369,38	97,68	(16.089.956.675,60)	(0,07)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	137.219.231.659,52	131.798.589.369,38	96,05	(5.420.642.290,14)	(0,04)
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten/Kota	31.348.638.800,81	31.348.638.800,81	100,00	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.094.188.000,00	83.094.188.000,00	100,00	-	-
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	83.094.188.000,00	83.094.188.000,00	100,00	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	825.000.000,00	100,00	-	-
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi :	825.000.000,00	825.000.000,00	100,00	-	-
4.3.6	Dana Alokasi Desa	12.410.047.000,00	12.410.047.000,00	100,00	-	-

B. Belanja daerah

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jemberana untuk tahun anggaran 2011 – 2014 dikelompokkan menjadi:



a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. Dalam APBD Kabupaten Jemberana Tahun 2015 direncanakan Rp. 654.649.337.753,32,- dengan realisasi Rp. 558.440.521.350,68 atau 85,30 % belum mencapai target sebesar Rp. 96.208.816.402,64 atau 14,70 %. Hal ini disebabkan karena adanya silfa yang cukup besar pada gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan, hibah dan bansos yang tidak dicairkan serta kelebihan dana untuk cost shharing JKBM.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan urusan, program dan kegiatan perangkat daerah pendanaan pendapatan daerah. Belanja langsung ini dibedakan menjadi 2 (dua) urusan yang terdiri dari urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari 8 (delapan) dilaksanakan berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Pada Tahun 2015 direncanakan Rp. 414.903.009.594,41,- realisasi Rp. 378.979.284.700,46 atau 85,30 % sehingga target yang belum tercapai adalah sebesar Rp. 96.208.816.402,64 atau 90,904 %. Adapun rincian target dan realisasi belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Jemberana Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Urusan Wajib terdiri dari 26 urusan direncanakan sebesar Rp. 392.290.189.201,30,- realisasi Rp. 358.532.804.421,46 atau 91,39 % sehingga silfa secara keseluruhan sebesar Rp. 33.757.384,84,- atau 9,10 %.
- Urusan Pilihan terdiri dari 8 urusan dianggarkan Rp. 24.612.820.393,11 realisasi Rp. 20.446.480.279,00 atau 93,04 % sehingga silfa secara keseluruhan sebesar Rp. 4.166.340.114,11,- atau 6,96 %.

Adapun ringkasan taget anggaran belanja dan capaian kinerja keuangan/ realisasi anggaran tahun 2015 sesuai dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan piluhan dan SKPD pelaksana adalah sepeerti tabel berikut :

Tabel 2.48
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015

No	Uraian	Target	Realisasi		Peningkatan/Penurunan Realisasi	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4		5 = 3-4	6,00
5	BELANJA	1.011.594.916.859,15	885.713.212.674,73	87,56	(125.881.704.184,42)	(12,44)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	594.691.907.264,74	506.733.927.976,27	85,21	(87.957.979.288,47)	(14,79)
5.1.1	Belanja Pegawai	475.549.358.817,56	397.650.713.627,00	83,62	(77.898.645.190,56)	(16,38)
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	287.732.739.572,56	274.570.607.472,00	95,43	(13.162.132.100,56)	(4,57)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	183.991.771.140,00	119.470.383.300,00	64,93	(64.521.387.840,00)	(35,07)
5.1.1.03	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD beserta KDH/WKDH	2.268.200.000,00	2.243.630.000,00	98,92	(24.570.000,00)	(1,08)
5.1.1.05	Insentif pemungutan pajak daerah	1.390.300.000,00	1.229.675.000,00	88,45	(160.625.000,00)	(11,55)
5.1.1.06	Insentif pemungutan retribusi daerah	166.348.105,00	136.417.855,00	82,01	(29.930.250,00)	(17,99)



Pemerintah Kabupaten Jemberana

5.1.4	Belanja Hibah	46.023.772.174,17	39.120.669.817,00	85,00	(6.903.102.357,17)	(15,00)
			-		-	
5.1.4.05	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	25.473.618.000,00	24.554.069.817,00	96,39	(919.548.183,00)	(3,61)
5.1.4.06	Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	12.502.000.000,00	8.168.500.000,00	65,34	(4.333.500.000,00)	(34,66)
5.1.4.07	Hibah dana BOS	2.858.154.174,17	1.736.100.000,00	60,74	(1.122.054.174,17)	(39,26)
5.1.4.09	Belanja Hibah Dana Pendidikan	5.190.000.000,00	4.662.000.000,00	89,83	(528.000.000,00)	(10,17)
5.1.5	Belanja Bantuan sosial	700.000.000,00	225.333.000,00	32,19	(474.667.000,00)	(67,81)
5.1.5.03.	Belanja Bantuan sosial kepada anggota Masyarakat	700.000.000,00	225.333.000,00	32,19	(474.667.000,00)	(67,81)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.099.593.982,51	13.099.593.982,51	100,00	0,00	0,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	12.133.658.314,41	12.133.658.314,41	100,00	0,00	0,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	965.935.668,10	965.935.668,10	100,00	-	-
			-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	58.919.182.290,50	56.636.018.306,76	96,12	(2.283.163.983,74)	(3,88)
5.1.7.03	Bantuan Keuangan Kepada Desa	4.896.429.658,50	4.895.200.000,00	99,97	(1.229.658,50)	(0,03)
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	40.958.547.000,00	40.880.231.999,97	99,81	(78.315.000,03)	(0,19)
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.000.000,00	503.584.793,10	68,51	(231.415.206,90)	(31,49)
5.1.7.06	Bantuan Keuangan Program JKBM	12.329.205.632,00	10.357.001.513,69	84,00	(1.972.204.118,31)	(16,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	1.599.243,00	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	1.599.243,00	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)
5.2	BELANJA LANGSUNG	416.903.009.594,41	378.979.284.698,46	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)
5.2.1	Blanja Pegawai	33.024.486.200,00	31.514.726.600,00	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.265.833.130,68	161.438.568.736,16	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)
5,2,3	Belanja Modal	198.612.690.263,73	186.025.989.362,30	0,40	(398.400.757,00)	(99,60)

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah yang disebut dengan surplus atau defisit anggaran.



Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja, peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN	114.636.657.465,98	113.972.094.690,79	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.197.329.622,00	122.522.094.690,79	
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	119.332.766.847,00	117.522.094.690,79	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	119.333.066.846,16	117.522.094.690,79	
6.1.1.04.01	Sisa Penghematan Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	75.488.242.616,00		
6.1.1.04.02	Sisa Penghematan Belanja Pegawai dari Belanja langsung	1.293.963.200,00		
6.1.1.04.03	Sisa Penghematan Belanja Barang dan jasa	19.685.809.968,43		
6.1.1.04.04	Sisa Penghematan Belanja Modal	11.236.373.928,18		
6.1.1.04.07	Sisa Penghematan Belanja Hibah	2.408.654.174,17		
6.1.1.04.08	Sisa Penghematan Belanja Bantuan Sosial	465.781.500,00		
6.1.1.04.10	Sisa Penghematan Belanja Bantuan Keuangan	6.520.731.028,09		
6.1.1.04.11	Sisa Penghematan Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00		
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	1.833.510.431,29		
6.1.1.04.14	Silpa		117.522.094.690,79	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	664.562.775,00		
6.1.6.06	Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir	664.562.775,00		
6.1.6.06.01	Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir	664.562.775,00		
6.1.7	Penerimaan Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.1.7.01	Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.1.7.01.01	Dana Talangan pembelian gabah petani oleh KUD	4.800.000.000,00	460000000	
6.1.7.01.02	Dana Talangan untuk produksi Kain tenun	200.000.000,00	200000000	



6.1.7.01.03	Dana Talangan untuk Koperasi Kakao	200.000.000,00	200000000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.560.672.156,02	8.550.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/BUMD	5.360.672.156,02	3.550.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	
6.2.2.02.01	BUMD	3.350.000.000,00	3.350.000.000	
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.2.03.02	Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	200.000.000,00	200.000.000	
6.2.2.04	Dana Bergulir	1.810.672.156,02		
6.2.2.04.01	Dana bergulir kepada kelompok masyarakat	1.810.672.156,02		
6.2.5	Pengeluaran dana talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.2.5.01	Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000	
6.2.5.01.01	Dana Talangan pembelian gabah petani oleh KUD	4.800.000.000,00	4.600.000.000	
6.2.5.01.02	Dana Talangan untuk produksi Kain tenun	200.000.000,00	200.000.000	
6.2.5.01.03	Dana Talangan untuk Koperasi Kakao	200.000.000,00	200.000.000	
3.2.2	Jaminan Kredit Daerah	1.810.672.156,00	1.810.672.156	
3.2.3	Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	-

Dengan memperhatikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja anggaran Kabupaten Jember Tahun 2015 bahwa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2015 terdapat defisit sebesar Rp. Rp.132.014.152.588,49,- sebagai akibat dari pelampauan pendapatan dan efisiensi akibat lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pendapatan daerah

- Pendapatan asli daerah dengan target Rp. 80.009.173.733,84 terealisasi Rp. 98.159.961.436,55 sehingga mengalami pelampauan yang cukup signifikan sebesar Rp. 18.148.931.146,71,- disebabkan karena adanya pelampauan pajak daerah utamanya Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan BPHTB, dan pelampauan pada lain – lain PAD yang sah sebagai akibat adanya pelampauan BLUD RSUD dan Puskesmas berkisar Rp. 14.429.880.487,80
- Dana perimbangan dengan target Rp. 583.400.619.000,- terealisasi Rp. 577.461.799.183,- target belum tercapai Rp. 5.938.819.817,00 akibat pengurangan penerimaan pada dana bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan.
- Lain – lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp. 233.548.466.659,52 terealisasi Rp. 228.127.824.369,- belum mencapai target Rp. 5.420.642.290,14,- karena realisasi bagi hasil pajak dari provinsi untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari Provinsi Bali.



2. Belanja Daerah :

- Pada belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 594.691.907.264,74,- terelalisasi Rp. 506.733.927.976,27 sehingga ada silfa sebesar Rp. 87.956.749.629,97,- sebagai akibat ada silfa pada gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah dan bansos yang tidak diamprah/ dicairkan dan adanya penghematan biaya pada sharring JKBM.
- Pada belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 416.903.009.594,41 terealisasi Rp. 378.979.284.700,46 terdapat silfa sebesar Rp. 37.932.496.693,95 hal ini disebabkan karena adanya silfa dalam penggunaan dana BLUD, silfa DAK utamanya dak sanitasi dan energi pedesaan yang tidak jalan dan penghematan dari belanja langsung baik perjalanan dinas, BBM dan sisa tender.

3. Pembiayaan :

- Pada pembiayaan terdapat pengurangan pencairan silfa sebesar Rp. 1.810.672.156,02 sebagai hasil audit bahwa penerimaan dana bergulir tidak dimasukkan dalam struktur pencatatan dalam APBD karena bagian dari investasi.

4. Sumber Pembiayaan :

- Mengingat terjadinya pelampauan anggaran sebagai akibat adanya pelampauan dana BLUD, pelampauan pendapatan asli daerah, dan silfa dari belanja pegawai dan DAK maka sumber pembiayaan dari silfa tahun 2015 adalah bersumber dari DAU, DAK, Pendapatan asli daerah. Sedangkan sumber pendanaan dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan BBNKB mengingat tidak tereliasi secara keseluruhan maka tidak ada dana bersumber dari pembiayaan dimaksud.

Adapun proyeksi realisasi pendapatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015 setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2015		
				Rp.	%
1	2	3	4,00	5 = 4 - 3	6
1.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	-	-	-	-
1.1	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	28.146.000.000,00	32.367.397.468,97	4.221.397.468,97	14,998
1.1.2	Retribusi Daerah	9.659.356.681,00	8.930.165.048,00	(729.191.633,00)	(7,549)
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.911.035.292,84	4.912.891.848,84	1.856.556,00	0,038
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	37.292.781.760,00	51.949.507.070,74	14.656.725.310,74	39,302



Pemerintah Kabupaten Jemberana

	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	80.009.173.733,84	98.159.961.436,55	18.150.787.702,71	22,686
1.2	DANA PERIMBANGAN	-			
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21.627.129.000,00	15.688.309.183,00	(5.938.819.817,00)	(27,460)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	486.895.030.000,00	486.895.030.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74.878.460.000,00	74.878.460.000,00	-	-
1.2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	583.400.619.000,00	577.461.799.183,00	(5.938.819.817,00)	(1,018)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-			
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	137.219.231.659,52	131.798.589.369,38	(5.420.642.290,14)	(3,950)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.094.188.000,00	83.094.188.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	825.000.000,00	-	-
1.3.6	Dana Alokasi Desa	12.410.047.000,00	12.410.047.000,00	-	100,000
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	233.548.466.659,52	228.127.824.369,38	(5.420.642.290,14)	(2,321)
				-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	896.958.259.393,36	903.749.584.988,93	6.791.325.595,57	0,757
2.	BELANJA DAERAH	-			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	475.549.358.817,56	397.650.713.627,00	(77.898.645.190,56)	(16,381)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	46.023.772.174,17	39.120.669.817,00	(6.903.102.357,17)	(14,999)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00	225.333.000,00	(474.667.000,00)	(67,810)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.099.593.982,51	13.099.593.982,51	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	58.919.182.290,50	56.636.018.306,76	(2.283.163.983,74)	(3,875)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	1.599.243,00	(398.400.757,00)	(99,600)



	Jumlah Belanja Tidak Langsung	594.691.907.264,74	506.733.927.976,27	(87.957.979.288,47)	(14,791)
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai			-	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			-	
2.2.3	Belanja Modal			-	
	Jumlah Belanja Langsung	416.903.009.594,41	378.979.284.700,46	(37.923.724.893,95)	(9,097)
	JUMLAH BELANJA (A+B+C)	1.011.594.916.859,15	885.713.212.676,73	(125.881.704.182,43)	(12,444)
III	SURPLUS (DEFISIT)	(114.636.657.465,79)	18.036.372.312,20	132.673.029.778,00	(115,734)
IV	PEMBIAYAAN				
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	a. Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	119.332.766.846,81	117.522.094.690,79	(1.810.672.156,02)	(1,517)
	b. Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	c. Penerimaan Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000,00	(200.000.000,00)	(3,846)
	d. Penerimaan kembali investasi dana bergulir	664.562.775,00	-	(664.562.775,00)	(100,000)
	Jumlah Penerimaan	125.197.329.621,81	122.522.094.690,79	(2.675.234.931,02)	(2,137)
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	a. Penyertaan Modal Saham (Dana Bergulir)	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	-	-
	b. Pengeluaran Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.000.000.000,00	(200.000.000,00)	(3,846)
	c. Pengeluaran Dana Bergulir	1.810.672.156,02		(1.810.672.156,02)	(100,000)
	Jumlah Pengeluaran	10.560.672.156,02	8.550.000.000,00	(2.010.672.156,02)	(19,039)
C.	PEMBIAYAAN NETO (A - B)	114.636.657.465,79	113.972.094.690,79	(664.562.775,00)	(0,580)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (III + C)	0,00	132.008.467.002,99	132.008.467.003,00	-

2.3. Evaluasi Target dan Realisasi Keuangan sampai Triwulan II RKPD Tahun 2016.

Sampai dengan triwulan II yaitu bulan Juni Tahun 2016 bahwa realisasi keuangan RKPD Tahun 2016 dari sesuai dengan perencanaan semestinya sudah terealisasi minimal 50 %. Namun demikian pada kenyataannya sampai dengan triwulan ke II bahwa realisasi keuangan untuk sektor pendapatan baru mencapai 44,58 %, sektor belanja baru mencapai 35,89 %. Untuk lebih jelas tentang realisasi keuangan semester I atau triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pada pendapatan daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.055.603.784.935,16 sampai dengan bulan juni 2016 baru terealisasi sebesar Rp. 470.595.479.408,92 atau



44,58 % dan belum terealisasi sebesar Rp. 585.008.305.526,24 atau 55,42 % dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan asli daerah dengan target Rp. 88.244.044.682,84 terealisasi Rp. 58.433.932.094,66 atau 66,22 % dan belum terealisasi Rp. 29.810.112.588,18 atau 33,78 %.
- Dana perimbangan dengan target Rp. 716.423.706.000,00,- terealisasi Rp. 337.602.898.990,00 atau 47,12 dan belum terealisasi Rp. 378.820.807.010,00 atau 52,88 % .
- Lain – lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp. 250.936.034.252,32 terealisasi Rp. 74.558.648.324,26 atau 44,58 % dan belum terealisasi Rp. 176.377.385.918,06. atau 55,42 %.

2. Belanja Daerah :

Belanja daerah pada tahun anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.094.006.784.935,16 realisasi sampai dengan bulan juni sebesar Rp. 392.659.862.948,17 atau 35, 89 % dan belum terealisasi sebesar Rp. 701.346.921.989,99 atau 64,11 % dengan rincian sebagai berikut :

- Pada belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 607.467.722.839,19 terelalisasi Rp. 265.296.909.575,35 atau 43,67 % dan belum terealisasi sebesar Rp. 342.170.813.263,84 atau 56,33 %.
- Pada belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 486.539.062.095,97 terealisasi Rp. 127.362.953.372,82 atau 26,18 % dan belum terealisasi sebesar Rp. 359.176.108.723,15 atau 73,82

3. Pembiayaan :

- Bahwa pada pembiayaan netto dari defisit tahun 2015 yang dipasang sebesar Rp. 38.403.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 133.876.986.104,01. Namun sesuai hasil audit BPK penerimaan dana bergulir tidak dimasukkan dalam struktur pencatatan dalam APBD karena bagian dari investasi sehingga ada pengurangan defisit sebesar Rp. 1.810.672.156,02 sehingga realisasi pembiayaan netto tahun 2016 yang bisam dimanfaatkan sebesar Rp. 132.008.467.002,99.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 (Triwulan II) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Jemberana Sampai Triwulan II
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Proyeksi 2016	Realisasi s/d Juni 2016	Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	-	-	-	-
1.1	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	31.646.000.000,00	16.167.281.541,00	(15.478.718.459,00)	(48,912)
1.1.2	Retribusi Daerah	9.658.800.681,00	5.446.714.280,00	(4.212.086.401,00)	(43,609)
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.028.019.075,84	6.183.843.903,55	2.155.824.827,71	53,521



Pemerintah Kabupaten Jemberana

1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	42.911.224.926,00	30.636.092.370,11	(12.275.132.555,89)	(28,606)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	88.244.044.682,84	58.433.932.094,66	(29.810.112.588,18)	(33,781)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.748.312.000,00	9.463.247.990,00	(11.285.064.010,00)	(54,390)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	562.525.134.000,00	328.139.651.000,00	(234.385.483.000,00)	(41,667)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	133.150.260.000,00	-	(133.150.260.000,00)	(100,000)
1.2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	716.423.706.000,00	337.602.898.990,00	(378.820.807.010,00)	(52,877)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	131.887.497.932,32	23.809.623.924,26	(108.077.874.008,06)	(81,947)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.875.057.320,00	33.780.937.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.310.000.000,00	250.000.000,00	(1.060.000.000,00)	(80,916)
1.3.6	Dana Alokasi Desa	27.863.479.000,00	16.718.087.400,00	(11.145.391.600,00)	(40,000)
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	250.936.034.252,32	74.558.648.324,26	(176.377.385.928,06)	(70,288)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	1.055.603.784.935,16	470.595.479.408,92	(585.008.305.526,24)	(55,419)
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	491.987.485.856,59	203.379.754.625,00	(288.607.731.231,59)	(58,662)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	13.621.044.174,17	4.325.000.000,00	(9.296.044.174,17)	(68,248)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.880.697.500,00	8.000.000,00	(2.872.697.500,00)	(99,722)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.082.796.352,91	6.033.118.525,00	(9.049.677.827,91)	(60,000)



Pemerintah Kabupaten Jemberana

2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	83.495.698.955,52	51.551.036.425,35	(31.944.662.530,17)	(38,259)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	(100,000)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	607.467.722.839,19	265.296.909.575,35	(342.170.813.263,84)	(56,327)
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	42.042.592.000,00	18.861.503.200,00	(23.181.088.800,00)	(55,137)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.015.342.579,11	75.054.699.468,82	(116.960.643.110,29)	(60,912)
2.2.3	Belanja Modal	252.481.127.516,86	33.446.750.704,00	(219.034.376.812,86)	(86,753)
	Jumlah Belanja Langsung	486.539.062.095,97	127.362.953.372,82	(359.176.108.723,15)	(73,823)
	JUMLAH BELANJA (A+B+C)	1.094.006.784.935,16	392.659.862.948,17	(701.346.921.986,99)	(64,108)
III	SURPLUS (DEFISIT)	(38.403.000.000,00)	77.935.616.460,75	116.338.616.460,75	(302,941)
IV	PEMBIAYAAN				
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	a. Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	42.321.143.381,02	133.876.986.104,01	91.555.842.722,99	216,336
	b. Penerimaan Piutang Daerah	664.562.775,00	-	(664.562.775,00)	(100,000)
	c. Penerimaan Dana Talangan	5.400.000.000,00	-	(5.400.000.000,00)	(100,000)
	Jumlah Penerimaan	48.385.706.156,02	133.876.986.104,01	85.491.279.947,99	176,687
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	a. Penyertaan Modal Saham (Dana Bergulir)	4.582.706.156,02	-	(4.582.706.156,02)	(100,000)
	b. Pengeluaran Dana Talangan	5.400.000.000,00	-	(5.400.000.000,00)	(100,000)
	Jumlah Pengeluaran	9.982.706.156,02	-	(9.982.706.156,02)	(100,000)
C.	PEMBIAYAAN NETO (A - B)	38.403.000.000,00	133.876.986.104,01	95.473.986.104,01	248,611
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (III + C)	0,00	211.812.602.564,76	211.812.602.564,76	-